Ulin - J Hut Trop Vol. 10 (2) : 614 -633
September 2026
pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI: https://doi.org/10.32522/g8m7da76

Asimetri Relasi Stakeholder dalam Tata Kelola Pengembangan Geowisata Berkelanjutan di UNESCO Global Geopark Ijen

Frisca Aulia Syifa'[1*], Sambas Basuni[2], Sarwititi Sarwoprasodjo[3]
[1]Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University
[2]Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University,
[3]Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia, IPB University
*Email: friscaauliasyifa@apps.ipb.ac.id

20 Juni 2026 Revisi diterima : 10 September 2026.

ABSTRACT

Sustainable geotourism development in the Ijen UNESCO Global Geopark requires governance capable of integrating conservation, education, and economic development interests through collaboration among diverse stakeholders. However, differences in influence, goal orientations, and institutional mandates among actors may create stakeholder relational asymmetry within governance. This study aims to analyze stakeholder relational asymmetry in the governance of sustainable geotourism development in the Ijen UNESCO Global Geopark using the MACTOR method. This study employed a mixed-methods approach, including semi-structured interviews, field observations, and document analysis. MACTOR analysis included the influence–dependence map, 3MAO, 3CAA, and 3DAA. The results revealed four stakeholder positions (key, relay, dependent, and autonomous actors), reflecting disparities in influence capacity within the governance structure. The 3MAO analysis showed that the objective of sustainable growth and economic stimulus received the highest level of support, whereas geotourism education and literacy received low support. Convergence was concentrated among planning actors, tourism actors, and the Management Board, while the strongest divergence occurred between BKSDA and planning and tourism actors regarding differences in area-management mandates. These findings indicate the need for an adaptive-collaborative governance approach through redistribution of decision-making space, alignment of strategic goals, strengthening of bridging actors, and management of institutional divergence and overlap.

Key words: stakeholder relationship asymmetry, sustainable geotourism, MACTOR, adaptive collaborative governance, Ijen UNESCO Global Geopark.

ABSTRAK

Pengembangan geowisata berkelanjutan di UNESCO Global Geopark Ijen memerlukan tata kelola yang mampu mengintegrasikan kepentingan konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi melalui kolaborasi berbagai *stakeholder*. Namun, perbedaan pengaruh, orientasi tujuan, dan kewenangan antaraktor dapat membentuk asimetri relasi *stakeholder* dalam tata kelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis asimetri relasi *stakeholder* dalam tata kelola pengembangan geowisata berkelanjutan di UNESCO Global Geopark Ijen menggunakan metode MACTOR. Penelitian menggunakan pendekatan *mixed methods* melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Analisis menggunakan MACTOR mencakup peta pengaruh–ketergantungan, 3MAO, 3CAA, dan 3DAA. Hasil menunjukkan adanya empat posisi *stakeholder* (aktor kunci, *relay*, *dependent*, dan *autonomous*) yang mencerminkan ketimpangan kapasitas pengaruh dalam tata kelola. Analisis 3MAO menunjukkan bahwa tujuan pertumbuhan dan stimulus ekonomi berkelanjutan memperoleh dukungan paling tinggi, sedangkan edukasi dan literasi geowisata memperoleh dukungan rendah. Konvergensi terkonsentrasi pada aktor perencanaan, pariwisata, dan Badan Pengelola, sementara divergensi terkuat terjadi antara BKSDA dan aktor perencanaan serta pariwisata terkait perbedaan mandat pengelolaan kawasan. Temuan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan tata kelola adaptif-kolaboratif melalui redistribusi ruang pengambilan keputusan, penyelarasan tujuan strategis, penguatan bridging actors, serta pengelolaan divergensi dan *overlap* kelembagaan.

Kata kunci: asimetri relasi *stakeholder*, geowisata berkelanjutan, MACTOR, tata kelola adaptif-kolaboratif, UNESCO Global Geopark Ijen.

PENDAHULUAN

Geopark merupakan kawasan bernilai geologi, ekologi, budaya, dan ekonomi yang dikelola secara terpadu untuk mendukung konservasi, pendidikan, dan ekonomi lokal. Selain melindungi *geoheritage*, geopark juga menjadi instrumen pengembangan geowisata yang tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya kawasan, tetapi juga oleh kemampuan tata kelola dalam menyelaraskan

kepentingan dan tindakan berbagai pemangku kepentingan. Pengelolaan geopark melibatkan aktor dengan kewenangan, sumber daya, dan orientasi yang beragam sehingga memerlukan koordinasi lintas sektor. Tantangan pengembangan geopark tidak terbatas pada peningkatan partisipasi, tetapi juga mencakup pembentukan tata kelola yang mampu mengakomodasi perbedaan kepentingan serta menjaga keseimbangan antara konservasi, pendidikan, dan manfaat ekonomi (Zhuang dkk., 2024; Sarwoprasodjo dkk., 2025).

Salah satu pendekatan yang relevan untuk mengelola kompleksitas tersebut adalah *collaborative governance*, yaitu proses pengambilan keputusan yang melibatkan aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan bersama (Ansell & Gash, 2008). Namun, keterlibatan berbagai aktor tidak secara otomatis menghasilkan kolaborasi yang setara. Perbedaan kewenangan formal, akses terhadap sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan memengaruhi keputusan dapat membentuk hubungan yang asimetris antar-*stakeholder*. Dalam perspektif kekuasaan Foucault, kekuasaan tidak hanya melekat pada institusi atau individu tertentu, tetapi juga terbentuk melalui jaringan relasi sosial, pengetahuan, dan praktik kelembagaan (Foucault, 1980). Perspektif ini memberikan landasan untuk memahami bahwa dinamika kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aktor dan forum koordinasi, tetapi juga oleh distribusi pengaruh, ketergantungan, serta kemampuan masing-masing aktor dalam memperjuangkan tujuan dan kepentingannya.

Persoalan tersebut relevan dalam pengembangan geowisata di UNESCO Global Geopark Ijen, yang mempertemukan kepentingan konservasi, pengelolaan kawasan, promosi wisata, pendidikan, dan pembangunan ekonomi lokal. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam konservasi dan geowisata berkaitan dengan karakteristik sosial, tingkat pengetahuan, serta intensitas interaksi dengan aktivitas geopark (Sarwoprasodjo dkk., 2025). Di sisi lain, perkembangan aktivitas wisata dapat menciptakan peluang ekonomi sekaligus meningkatkan tekanan terhadap lingkungan dan kapasitas pengelolaan kawasan. Studi di Desa Tamansari, Banyuwangi, misalnya, menunjukkan adanya paradoks antara peningkatan peluang ekonomi dan bertambahnya beban lingkungan akibat pertumbuhan wisata (Sarwoprasodjo dkk., 2026a). Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan geowisata. Akan tetapi, keberadaan berbagai aktor dengan mandat dan kepentingan yang berbeda juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana relasi antaraktor terbentuk dan bagaimana perbedaan posisi mereka dapat memengaruhi proses tata kelola (Yuliaty dkk., 2021; Dwipati dkk., 2025).

Meskipun partisipasi masyarakat dan kolaborasi antarpemangku kepentingan telah menjadi perhatian dalam penelitian geopark, aspek relasional dalam tata kelola masih perlu dikaji lebih mendalam. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa komunitas lokal dapat menghadapi keterbatasan pengetahuan dan partisipasi dalam pengelolaan geopark sehingga memerlukan penguatan kapasitas dan keterlibatan yang lebih substantif (Mafruhah dkk., 2020; Ibrahim dkk., 2021). Selain itu, kelembagaan lokal menunjukkan potensi organisasi masyarakat dalam menghubungkan pengelolaan lingkungan, kegiatan ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat (Sarwoprasodjo dkk., 2026a). Hal tersebut mengindikasikan bahwa posisi masyarakat dalam tata kelola tidak dapat dipahami hanya berdasarkan keberadaan atau tingkat partisipasinya karena ketimpangan relasi dapat membatasi keterlibatan substantif sebagian aktor dan menyulitkan penyelarasan agenda konservasi dengan pengembangan ekonomi lokal.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas partisipasi masyarakat, pengembangan kelembagaan lokal, strategi pengelolaan geopark, dan komunikasi publik, masih diperlukan pemahaman yang lebih terintegrasi mengenai konfigurasi relasi antar-stakeholder dalam tata kelola geowisata. Secara khusus, belum memadainya pemahaman mengenai hubungan antara pengaruh, ketergantungan, orientasi tujuan, konvergensi, dan divergensi antaraktor menjadi kesenjangan yang perlu ditelaah. Penelitian mengenai peran relatif aktor dalam pengelolaan geopark menunjukkan pentingnya memahami posisi dan kontribusi masing-masing pihak dalam struktur tata kelola (Hadian dkk., 2025). Selain itu, konvergensi dan divergensi kepentingan perlu diperhatikan karena perbedaan orientasi antaraktor dapat memengaruhi koordinasi dan perumusan strategi bersama (Munajat dkk., 2022; Kurnianingsih dkk., 2025). Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan metode MACTOR (*Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives and Recommendations*), yang memungkinkan analisis sistematis terhadap pengaruh–ketergantungan antaraktor, posisi aktor terhadap tujuan strategis, serta pola konvergensi dan divergensi. Pendekatan

pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI: https://doi.org/10.32522/g8m7da76

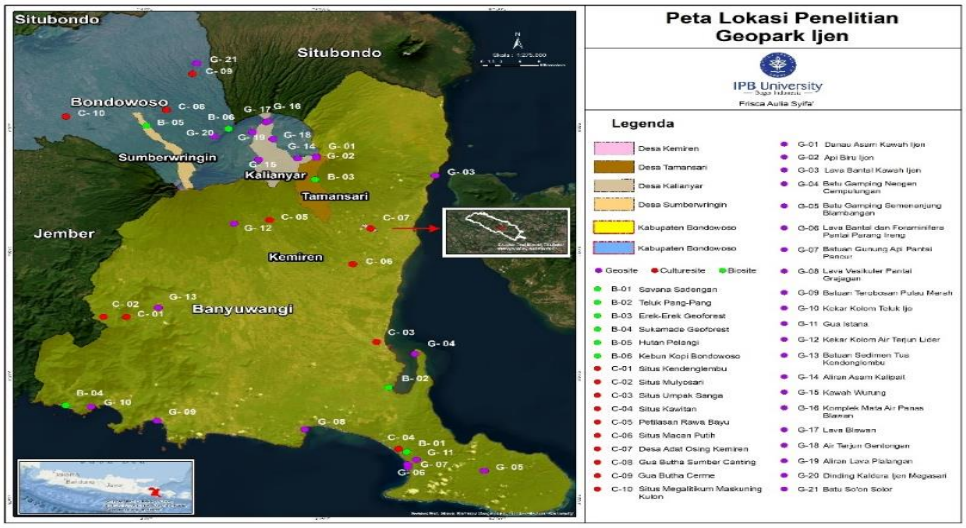
ini memungkinkan kajian asimetri relasi stakeholder melampaui identifikasi aktor dan deskripsi partisipasi, dengan menelaah konfigurasi hubungan yang membentuk dinamika tata kelola.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis asimetri relasi *stakeholder* dalam tata kelola pengembangan geowisata berkelanjutan di UNESCO Global Geopark Ijen mencakup pemetaan pengaruh–ketergantungan antaraktor, penilaian posisi aktor terhadap tujuan strategis melalui 3MAO, serta identifikasi pola konvergensi dan divergensi melalui 3CAA dan 3DAA. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dengan memperjelas bagaimana perbedaan posisi, ketergantungan, dan orientasi kepentingan membentuk konfigurasi relasi *stakeholder* dalam tata kelola geowisata. Hasil analisis diharapkan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi penguatan tata kelola yang adaptif dan kolaboratif, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara konservasi, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Juli 2025 di UNESCO Global Geopark Ijen yang mencakup Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Pengumpulan data difokuskan pada empat desa yang dipilih secara purposif, yaitu Kemiren dan Tamansari di Banyuwangi serta Kalianyar dan Sumberwringin di Bondowoso. Keempat desa tersebut ditetapkan sebagai lokus empiris penelitian, yaitu lokasi utama untuk observasi lapangan dan pengumpulan informasi mengenai kondisi pengelolaan geowisata, interaksi *stakeholder*, pemanfaatan geowisata, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat lokal. Keempat desa juga merepresentasikan keterhubungan antara pengelolaan situs dan struktur tata kelola yang lebih luas, karena pengembangan masing-masing situs melibatkan aktor desa, pemerintah daerah, lembaga konservasi, badan usaha, komunitas, dan *stakeholder* lainnya. Kemiren terkait dengan *culture site* Desa Adat Osing Kemiren; Tamansari dengan Geosite Api Biru Ijen dan Biosite Erek-Erek Geoforest; Kalianyar dengan tujuh *geosite*, yaitu Danau Asam Kawah Ijen, Aliran Asam Kalipait, Kawah Wurung, Kompleks Mata Air Panas Blawan, Lava Blawan, Air Terjun Gentongan, dan Aliran Lava Plalangan; sedangkan Sumberwringin terkait dengan *biosite* Hutan Pelangi dan *culture site* Tari Singo Ulung dan Petik Kopi.



Gambar 1. Lokasi penelitian di Geopark Ijen.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *exploratory sequential* yang diawali dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif, lalu dilanjutkan dengan tahap kuantitatif dengan mengintegrasikan data kualitatif dari wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan

observasi pada empat desa yang menjadi lokus empiris penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen kelembagaan Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Ijen, dokumen kebijakan pemerintah, laporan pengelolaan geopark, publikasi ilmiah, dan data statistik yang relevan. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan relevansinya terhadap sistem tata kelola Geopark Ijen. Kriteria pemilihan meliputi: (1) memiliki kewenangan atau tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan geopark; (2) terlibat dalam pengembangan atau aktivitas geowisata; (3) memiliki pengetahuan mengenai kebijakan, program, atau pengelolaan kawasan; (4) memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat, konservasi, ekonomi, edukasi, atau pengembangan pariwisata; dan (5) bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 44 informan diwawancarai dan dikelompokkan berdasarkan fungsi serta posisi kelembagaannya dalam sistem tata kelola. Keragaman tersebut mencerminkan karakter tata kelola Geopark Ijen yang bersifat lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Rincian informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi informan berdasarkan *stakeholder* yang teridentifikasi, tingkat/ruang tata kelola, dan label dalam analisis MACTOR

***Stakeholder* yang teridentifikasi**	**Label**	**Jumlah Informan**
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur	BKSDA	3
Balai Taman Nasional Alas Purwo	TN	1
Bappeda Provinsi Jawa Timur	BappedaProv	1
Bappeda Kabupaten Banyuwangi	BappedaKab	1
Bappeda Kabupaten Bondowoso	BappedaKab	1
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur	DisparProv	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	DisparKab	1
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso	DisparKab	1
Badan Pengelola Geopark Ijen	BP	4
KPH Banyuwangi Barat	Perhutani	1
KPH Bondowoso	Perhutani	1
PTPN	PTPN	1
BUMDes	BUMDes	4
DMS (inisial nama)	Investor	1
BBN (inisial nama)	Investor	1
Ijen Geopark Youth Forum (IGYF)	IGYF	2
Emvitrust	Emvitrust	1
FK3I Bondowoso	FK3I	1
Pokdarwis	Pokdarwis	4
Universitas Negeri Malang	Akademisi	1
Universitas Negeri Jember	Akademisi	1
Politeknik Banyuwangi	Akademisi	1
Pelaku wisata (homestay, pemandu, dan kuliner)	Pelaku	8
Radar Banyuwangi	Media	1
Detik.com	Media	1

Stakeholder diidentifikasi melalui telaah dokumen kelembagaan Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Ijen SK Gubernur Jawa Timur tentang Pengelola Geopark Ijen Tahun 2025–2029. Berdasarkan proses identifikasi dan verifikasi tersebut, aktor kelembagaan yang relevan selanjutnya ditetapkan sebagai unit analisis dalam MACTOR. Informan wawancara dan aktor dalam analisis MACTOR merupakan dua unit yang berbeda. Informan merupakan individu yang memberikan informasi melalui wawancara, sedangkan aktor MACTOR merupakan unit kelembagaan atau kelompok *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan posisi strategis dalam sistem tata kelola. Beberapa informan dapat merepresentasikan satu aktor kelembagaan yang sama sehingga jumlah informan tidak harus sama dengan jumlah aktor yang dianalisis. Setelah proses identifikasi dan verifikasi *stakeholder*, informasi dari informan digunakan untuk

pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI: https://doi.org/10.32522/g8m7da76

menyusun dan mengonfirmasi posisi masing-masing aktor kelembagaan dalam matriks MDI.

Analisis tata kelola tidak dibatasi hanya pada *stakeholder* yang berada secara administratif di dalam desa karena pengelolaan melibatkan hubungan kelembagaan lintas tingkat pemerintahan dan lintas sektor. Oleh karena itu, batas geografis penelitian ditetapkan pada empat desa sebagai lokus empiris, sedangkan batas sistem tata kelola ditentukan berdasarkan keterlibatan *stakeholder* dalam pengelolaan. Dengan pembedaan tersebut, *stakeholder* pada tingkat desa, kabupaten, provinsi, nasional, maupun organisasi nonpemerintah dapat dianalisis sepanjang memiliki kewenangan, kepentingan, pengaruh, ketergantungan, atau fungsi yang relevan terhadap tata kelola Geopark Ijen.

Penilaian hubungan aktor dilakukan terhadap tujuh tujuan strategis pengembangan geowisata berkelanjutan, yaitu: (OBJ01) edukasi dan literasi geowisata berbasis laboratorium alam; (OBJ02) penguatan tata kelola kolaboratif melalui pendekatan *bottom-up*; (OBJ03) penguatan regulasi pengembangan geowisata berbasis masyarakat; (OBJ04) pelestarian *geodiversity*, *biodiversity*, dan *cultural diversity*; (OBJ05) pertumbuhan dan stimulus ekonomi berkelanjutan; (OBJ06) integrasi nilai sosial-budaya lokal dalam pengembangan geowisata; serta (OBJ07) promosi dan penguatan branding kawasan UNESCO Global Geopark Ijen. Ketujuh tujuan tersebut disusun melalui sintesis studi pustaka, dokumen kebijakan, serta hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan sehingga merepresentasikan tujuan strategis utama pengelolaan Geopark Ijen

Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode MACTOR (*Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives, and Recommendations*) untuk mengevaluasi asimetri relasi *stakeholder* dalam tata kelola pengembangan geowisata berkelanjutan. Metode ini dipilih karena mampu menganalisis pengaruh dan ketergantungan antaraktor, posisi aktor terhadap tujuan strategis, serta pola konvergensi dan divergensi kepentingan (Fauzi, 2019). Tahapan analisis meliputi: (1) Identifikasi *stakeholder*; (2) Penentuan tujuan strategis; (3) Penyusunan *Matrix of Direct Influence* (MDI); (4) Penyusunan *Matrix Actor–Objective* (MAO); (5) Analisis pengaruh–ketergantungan; (6) Analisis 3MAO; (7) Analisis konvergensi (3CAA); dan (8) Analisis divergensi (3DAA).

Tahap pertama, *stakeholder* diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara, observasi, telaah dokumen, serta kewenangan, kepentingan, pengaruh, dan ketergantungan dalam pengelolaan Geopark Ijen. Sebanyak 44 informan digunakan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi *stakeholder*, sedangkan aktor kelembagaan yang telah ditetapkan menjadi unit analisis MACTOR. Pada tahap kedua, tujuan strategis dirumuskan berdasarkan sintesis hasil wawancara, dokumen kebijakan dan pengelolaan geopark, serta literatur, yang menghasilkan tujuh tujuan: OBJ01 edukasi dan literasi geowisata; OBJ02 tata kelola kolaboratif *bottom-up*; OBJ03 regulasi berbasis masyarakat; OBJ04 pelestarian *geodiversity, biodiversity,* dan *cultural diversity*; OBJ05 pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; OBJ06 integrasi nilai sosial-budaya lokal; dan OBJ07 promosi dan *branding* Geopark Ijen.

Pada tahap ketiga dan keempat, MDI dan MAO dilakukan melalui pendekatan hibrida. Peneliti terlebih dahulu mengodekan informasi mengenai hubungan pengaruh langsung antaraktor berdasarkan transkrip wawancara mendalam, observasi, dan dokumen yang relevan, kemudian menerjemahkan bukti naratif tersebut ke dalam skala ordinal MACTOR. Penilaian hubungan pengaruh antaraktor pada *Matrix of Direct Influence* (MDI) menggunakan skala ordinal 0–4 sebagaimana dikembangkan dalam metode MACTOR (Fauzi, 2019), di mana skor 0 menunjukkan tidak terdapat pengaruh langsung antaraktor, skor 1 menunjukkan pengaruh rendah yang terbatas pada hubungan operasional, skor 2 menunjukkan pengaruh sedang yang berkaitan dengan pelaksanaan program atau proyek, skor 3 menunjukkan pengaruh kuat terhadap pencapaian misi organisasi, sedangkan skor 4 menunjukkan pengaruh sangat kuat yang bersifat menentukan terhadap keberadaan, arah kebijakan, maupun keputusan aktor lain. Penilaian posisi aktor terhadap tujuan strategis pada *Matrix of Actors and Objectives* (MAO) menggunakan rentang skor −4 sampai +4. Nilai positif menunjukkan tingkat dukungan aktor terhadap suatu tujuan strategis, sedangkan nilai negatif menunjukkan tingkat penolakan. Semakin besar nilai absolut skor yang diberikan, semakin kuat tingkat dukungan maupun penolakan aktor terhadap tujuan tersebut. Nilai 0 menunjukkan bahwa aktor bersifat netral atau tidak memiliki posisi yang signifikan terhadap tujuan yang dinilai. Skala ini memungkinkan analisis mengenai tingkat mobilisasi, konvergensi, dan divergensi antaraktor dalam sistem tata kelola.

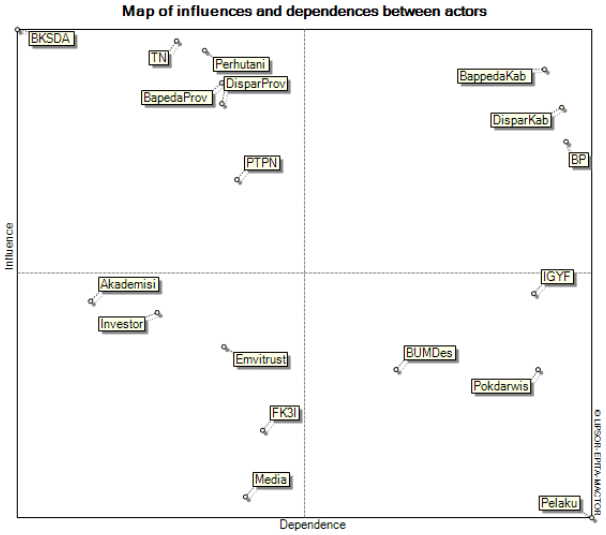
Penilaian mempertimbangkan bukti mengenai kewenangan, kapasitas pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumber daya, serta kemampuan aktor memengaruhi keputusan atau tindakan aktor

lain. Skor awal yang dihasilkan peneliti kemudian dikonfirmasi melalui *member-checking* bersama informan kunci/*expert* untuk memeriksa kesesuaian interpretasi dan melakukan klarifikasi atau revisi skor berdasarkan informasi empiris yang terverifikasi.

Untuk meningkatkan kredibilitas analisis, hasil kodifikasi dan penyusunan matriks dikonfirmasi melalui *member-checking* dengan informan kunci/*expert*. Proses tersebut digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara interpretasi peneliti dan kondisi empiris, khususnya dalam menentukan tingkat pengaruh antaraktor serta posisi aktor terhadap tujuan strategis. Seluruh matriks ditabulasi menggunakan Microsoft Excel, sedangkan pengolahan MACTOR dilakukan menggunakan perangkat lunak MACTOR. Output analisis berupa *influence–dependence map*, 3MAO, 3CAA, dan 3DAA kemudian diinterpretasikan secara terpadu untuk menjelaskan pola *stakeholder relational asymmetry* dan implikasinya terhadap tata kelola pengembangan geowisata berkelanjutan di UNESCO Global Geopark Ijen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Pengaruh dan Ketergantungan *Stakeholders*



Gambar 2. Peta pengaruh dan ketergantungan *stakeholders*.

Hasil pemetaan *influence–dependence* (Gambar 2) menunjukkan bahwa tata kelola pengembangan geowisata di UNESCO Global Geopark Ijen masih dicirikan oleh asimetri relasi *stakeholder*, yaitu ketidakseimbangan distribusi pengaruh dan ketergantungan antaraktor dalam proses pengambilan keputusan. Asimetri tersebut memperlihatkan bahwa peran setiap *stakeholder* tidak hanya ditentukan oleh tingkat keterlibatannya dalam pengelolaan geowisata, tetapi juga oleh kewenangan kelembagaan, penguasaan sumber daya, dan posisi strategis dalam struktur tata kelola. Efektivitas pengembangan geowisata tidak hanya bergantung pada banyaknya aktor yang terlibat, tetapi pada bagaimana hubungan antaraktor membentuk koordinasi dan kolaborasi dalam sistem tata kelola (*multi-level governance*) (Zhuang dkk., 2024; Sarwoprasodjo dkk., 2025).

Aktor yang berada pada Kuadran I terdiri atas BKSDA, Taman Nasional, Perhutani, Bappeda Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi, dan PTPN yang memiliki pengaruh tinggi dengan ketergantungan rendah. Posisi ini menunjukkan bahwa aktor-aktor tersebut merupakan aktor kunci (*key actors*) atau sering disebut juga dengan aktor dominan (*dominant actors*)/*driver actors* yang memiliki kapasitas terbesar dalam menentukan arah kebijakan, mengendalikan pemanfaatan kawasan, serta memengaruhi keputusan strategis pengembangan geowisata. Dominasi ini tidak semata-mata disebabkan oleh kapasitas organisasi, tetapi karena adanya legitimasi formal melalui regulasi, kewenangan pengelolaan kawasan, serta kontrol terhadap instrumen perencanaan dan perizinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur tata kelola Geopark Ijen masih didominasi oleh aktor sektoral yang memiliki otoritas formal sehingga proses pengambilan keputusan cenderung berlangsung secara hierarkis (*top-down*) dibandingkan kolaboratif. Temuan ini sejalan dengan karakteristik *multi-level governance* pada kawasan konservasi yang menunjukkan bahwa aktor dengan mandat kelembagaan memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan aktor implementatif maupun komunitas lokal (Zhuang dkk., 2024; Meza-Arce dkk., 2020).

pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI: https://doi.org/10.32522/g8m7da76

Pada Kuadran II, Bappeda Kabupaten, Dinas Pariwisata Kabupaten, dan Badan Pengelola Geopark menempati posisi pengaruh tinggi sekaligus ketergantungan tinggi. Posisi ini menunjukkan peran sebagai aktor *relay*, yaitu aktor yang berfungsi menghubungkan kebijakan dengan implementasi di lapangan. Posisi ini terbentuk karena ketiga aktor berada pada persimpangan antara perumusan kebijakan di tingkat provinsi dan implementasi program di tingkat lokal. Mereka memiliki tanggung jawab mengoordinasikan berbagai kepentingan lintas sektor, tetapi pada saat yang sama sangat bergantung pada keputusan, anggaran, dan regulasi dari aktor kunci. Oleh karena itu, kapasitas aktor penghubung tidak ditentukan oleh besarnya kewenangan formal, melainkan oleh kemampuan membangun koordinasi vertikal dan horizontal antarorganisasi. Semakin efektif fungsi koordinasi tersebut dijalankan, semakin besar peluang kebijakan dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang konsisten di lapangan (Ilhami dkk., 2024; Lee & Karimova, 2021).

Sebaliknya, Kuadran III ditempati oleh BUMDes, Pokdarwis, IGYF, dan pelaku wisata yang memiliki pengaruh rendah tetapi ketergantungan tinggi. Posisi ini menunjukkan bahwa aktor lokal lebih banyak berperan sebagai pelaksana kebijakan (*dependent actors*) atau sering disebut juga dengan aktor didominasi (*dominated actors*)/*driven actors*, aktor ini sangat rentan karena bergantung oleh keputusan aktor dominan. Rendahnya pengaruh mereka bukan karena kurangnya kontribusi terhadap pengembangan geowisata, tetapi karena terbatasnya akses terhadap forum pengambilan keputusan, rendahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya kewenangan dalam menentukan prioritas pembangunan. Akibatnya, partisipasi masyarakat cenderung bersifat implementatif, yaitu menjalankan program yang telah ditetapkan, bukan terlibat dalam proses penyusunan agenda maupun perumusan kebijakan. Kondisi ini menjelaskan mengapa manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat, tetapi ruang untuk memengaruhi arah tata kelola masih relatif terbatas. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Tichaawa dan Lekgau (2025) serta Meza-Arce dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa komunitas lokal pada kawasan konservasi sering kali memiliki tingkat ketergantungan tinggi meskipun menjadi pelaksana utama aktivitas wisata.

Sementara itu, Kuadran IV terdiri atas Akademisi, Investor, Media, Emvitrust, dan FK3I yang memiliki pengaruh maupun ketergantungan relatif rendah, sehingga dikategorikan sebagai aktor otonom (*autonomous actors*). Posisi ini menunjukkan bahwa aktor-aktor tersebut belum terintegrasi secara optimal dalam jaringan tata kelola, bukan karena perannya tidak penting, tetapi karena fungsi yang dijalankan masih bersifat komplementer dan belum terhubung secara sistematis dengan proses pengambilan keputusan. Akademisi berkontribusi melalui penelitian dan peningkatan kapasitas, media melalui komunikasi publik, sedangkan investor melalui dukungan pembiayaan. Namun, belum adanya mekanisme kolaborasi yang menghubungkan fungsi-fungsi tersebut dengan aktor inti menyebabkan potensi kontribusinya belum dimanfaatkan secara maksimal. Rendahnya pengaruh aktor otonom lebih mencerminkan lemahnya integrasi kelembagaan daripada rendahnya kapasitas aktor itu sendiri. Temuan ini mendukung penelitian Yasa dkk. (2024) dan Zhang dkk. (2025) bahwa aktor pendukung dapat menjadi sumber inovasi tata kelola apabila diintegrasikan ke dalam jejaring kolaborasi yang lebih inklusif.

Asimetri relasi *stakeholder* di Geopark Ijen terbentuk melalui tiga mekanisme utama, yaitu (1) konsentrasi kewenangan formal pada aktor konservasi dan pemerintah, (2) ketergantungan aktor implementatif terhadap keputusan aktor kunci, dan (3) belum terintegrasinya aktor pendukung ke dalam jejaring pengambilan keputusan. Ketiga mekanisme tersebut menjelaskan bahwa efektivitas tata kelola tidak hanya dipengaruhi oleh distribusi pengaruh, tetapi juga oleh bagaimana struktur kelembagaan membentuk akses, koordinasi, dan peluang setiap aktor untuk memengaruhi keputusan. Oleh karena itu, pengembangan geowisata berkelanjutan memerlukan tata kelola adaptif-kolaboratif yang tidak hanya memperluas partisipasi, tetapi juga mendistribusikan ruang koordinasi, memperkuat kapasitas aktor lokal, dan mengintegrasikan aktor otonom ke dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan.

Mobilisasi *Stakeholder* terhadap Tujuan Strategis (3MAO)

Analisis 3MAO (*3rd Matrix of Actors and Objectives*) menggambarkan tingkat mobilisasi *stakeholder* terhadap tujuh tujuan strategis pengembangan geowisata berkelanjutan di UNESCO Global Geopark Ijen. Berbeda dengan peta *influence–dependence* yang menjelaskan distribusi pengaruh antaraktor, analisis 3MAO menunjukkan arah orientasi strategis yang menjadi dasar perilaku *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan. Tingkat kesepakatan (*agreement*) maupun ketidaksepakatan

(*disagreement*) tidak hanya mencerminkan preferensi terhadap suatu tujuan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana mandat kelembagaan, kepentingan organisasi, dan fungsi masing-masing aktor membentuk prioritas tata kelola (Fauzi, 2019).

3MAO	labor alam	kolab-bttm	regulasi	diversity	ekonomi	sosbud	branding	Mobilisation
BKSDA	-3,7	-1,8	0,0	7,4	3,7	-3,7	-5,5	25,7
TN	-3,2	0,0	0,0	6,4	3,2	-3,2	-3,2	19,1
PTPN	-2,3	0,0	0,0	1,2	4,6	-3,5	1,2	12,7
Perhutani	-3,1	0,0	0,0	4,6	6,1	-4,6	1,5	19,9
BUMDes	-1,8	0,0	0,0	-1,8	2,5	-0,6	0,6	7,4
BapedaProv	1,4	5,7	5,7	0,0	5,7	2,9	2,9	24,3
DisparProv	1,4	5,5	4,1	0,0	5,5	2,7	4,1	23,3
BappedaKab	1,2	4,6	4,6	1,2	4,6	3,5	4,6	24,4
DisparKab	1,1	4,3	4,3	1,1	4,3	3,2	4,3	22,5
BP	1,0	4,0	4,0	2,0	4,0	3,0	4,0	21,8
IGYF	0,0	0,7	0,7	0,7	2,1	0,7	0,7	5,6
FK3I	0,0	1,1	0,6	1,7	1,7	0,6	-1,7	7,4
Pokdarwis	-1,7	0,0	0,6	-1,7	2,2	0,6	0,6	7,2
Emvitrust	-0,8	0,0	1,5	0,0	2,3	0,8	0,8	6,2
Pelaku	-0,9	-0,6	0,0	0,3	1,2	-0,6	0,6	4,2
Investor	-2,7	-1,8	0,0	0,0	3,6	-2,7	2,7	13,6
Akademisi	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	1,0	12,0
Media	-1,3	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	1,3	4,0
Number of agreements	6,0	27,9	28,1	28,4	59,3	20,9	30,8	
Number of disagreements	-21,5	-4,2	0,0	-4,8	0,0	-18,9	-10,4	
Degree of mobilisation	27,5	32,2	28,1	33,2	59,3	39,7	41,2	

© LIPSOR-EPITA-MACTOR

Gambar 3. Matriks 3MAO.

Hasil analisis 3MAO menunjukkan bahwa Pertumbuhan dan Stimulus Ekonomi Berkelanjutan (OBJ05) memperoleh tingkat mobilisasi tertinggi, yaitu 59,3, dengan *number of agreements* sebesar (59,3) dan *number of disagreements* sebesar (0). Tingginya mobilisasi OBJ05 menunjukkan bahwa tujuan ekonomi memiliki tingkat keselarasan paling kuat di antara 18 *stakeholder* yang dianalisis. Perhutani memiliki skor posisi tertinggi terhadap OBJ05 (6,1), diikuti BappedaProv (5,7), DisparProv (5,5), PTPN (4,6), BappedaKab (4,6), DisparKab (4,3), dan BP (4,0). Sementara itu, skor terendah tetap berada pada posisi positif, yaitu Pelaku (1,2), diikuti IGYF (2,1), Pokdarwis (2,2), BUMDes (2,5), Emvitrust (2,3), dan FK3I (1,7). Pola tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan *common ground* yang relatif kuat dalam sistem tata kelola Geopark Ijen karena tidak terdapat posisi negatif terhadap tujuan ini. Kesamaan kepentingan tersebut dapat dipahami karena pengembangan geowisata berkaitan dengan pembangunan daerah, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengembangan usaha lokal. Bagi pemerintah, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan agenda pembangunan daerah, sedangkan bagi masyarakat dan pelaku usaha, geowisata menyediakan peluang pendapatan dan pengembangan ekonomi lokal. Temuan ini sejalan dengan Carrillo-Hernández dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa geowisata mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi lokal apabila manfaat ekonomi dirasakan oleh berbagai kelompok *stakeholder*. Abd Halim dkk. (2025) juga menjelaskan bahwa manfaat ekonomi merupakan faktor utama yang memperkuat komitmen *stakeholder* dalam mendukung pengembangan geowisata berkelanjutan. Tingginya mobilisasi terhadap OBJ05 tidak hanya menunjukkan adanya kesepakatan, tetapi juga menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dapat berfungsi sebagai titik temu (*common ground*) yang mempertemukan aktor dengan mandat kelembagaan yang berbeda.

Sebaliknya, Edukasi dan Literasi Geowisata (OBJ01) memperoleh tingkat mobilisasi terendah, yaitu (27,5), dengan *number of agreements* sebesar 6,0 dan *number of disagreements* sebesar (−21,5). Nilai tersebut menunjukkan bahwa OBJ01 merupakan tujuan dengan tingkat konsolidasi paling rendah dibandingkan tujuan strategis lainnya dan sekaligus memiliki nilai *disagreement* absolut terbesar. BappedaProv dan DisparProv memiliki skor posisi tertinggi, masing-masing sebesar (1,4), diikuti BappedaKab (1,2) dan DisparKab (1,1). Sebaliknya, BKSDA memiliki skor terendah (−3,7), diikuti TN (−3,2), Perhutani (−3,1), Investor (−2,7), PTPN (−2,3), BUMDes (−1,8), dan Pokdarwis (−1,7). Sementara itu, IGYF, FK3I, dan Akademisi berada pada posisi netral (0). Rendahnya mobilisasi OBJ01 tidak menunjukkan bahwa seluruh *stakeholder* menolak agenda edukasi, tetapi menunjukkan adanya variasi posisi dan tingkat prioritas terhadap tujuan tersebut. Perbedaan ini penting bagi implementasi kebijakan karena aktor dengan skor relatif rendah memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan aktor yang telah menunjukkan posisi positif. Manfaat geoedukasi yang cenderung bersifat jangka panjang melalui peningkatan kapasitas, perubahan perilaku, penguatan literasi, dan kesadaran konservasi dapat dipersepsikan

pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI: https://doi.org/10.32522/g8m7da76

kurang langsung dibandingkan manfaat ekonomi. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian Mammadova dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi UNESCO Global Geopark di berbagai negara masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan fungsi geoedukasi ke dalam kebijakan pengelolaan. Carrillo-Hernández dkk. (2024) juga menegaskan bahwa keberhasilan geowisata berkelanjutan sangat bergantung pada kemampuan menghubungkan fungsi edukasi dengan manfaat ekonomi sehingga keduanya tidak dipandang sebagai tujuan yang saling bersaing.

Variasi posisi *stakeholder* terhadap OBJ01 juga menunjukkan bahwa prioritas aktor bersifat spesifik terhadap tujuan strategis. Hal ini terlihat pada BKSDA, yang memperoleh skor terendah terhadap OBJ01 (−3,7), tetapi justru memiliki skor tertinggi terhadap Pelestarian *Geodiversity*, *Biodiversity*, dan *Cultural Diversity* (OBJ04) sebesar (7,4). Pola yang sama terlihat pada TN, yang memiliki skor (−3,2) terhadap OBJ01 tetapi (6,4) terhadap OBJ04, serta Perhutani, yang memiliki skor (−3,1) terhadap OBJ01 tetapi (4,6) terhadap OBJ04. Sebaliknya, BappedaProv dan DisparProv menunjukkan posisi positif terhadap OBJ01, masing-masing sebesar (1,4), sekaligus memiliki posisi tinggi terhadap OBJ02, OBJ03, OBJ05, dan OBJ07. Temuan tersebut menunjukkan bahwa posisi *stakeholder* tidak dapat dipahami secara tunggal berdasarkan karakteristik kelembagaan, tetapi perlu dilihat berdasarkan tujuan strategis yang sedang dinegosiasikan. Oleh karena itu, aktor dengan skor rendah terhadap OBJ01 tidak dapat langsung dikategorikan sebagai aktor yang tidak mendukung edukasi, tetapi sebagai aktor yang menempatkan tujuan tersebut pada prioritas relatif lebih rendah dibandingkan tujuan lainnya. Dalam implementasi kebijakan, kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi diferensiasi aktor, misalnya dengan mengintegrasikan geoedukasi dengan fungsi konservasi bagi BKSDA, TN, dan Perhutani, menghubungkannya dengan pemberdayaan dan manfaat ekonomi bagi BUMDes dan Pokdarwis, serta memperkuat peran BappedaProv, DisparProv, BappedaKab, dan DisparKab sebagai aktor pengintegrasi agenda geoedukasi ke dalam perencanaan dan program geowisata.

Tujuan Integrasi Nilai Sosial-Budaya Lokal (OBJ06) memperoleh *number of agreements* sebesar (20,9), *number of disagreements* sebesar (−18,9), dan tingkat mobilisasi sebesar (39,7). Akademisi memiliki skor posisi tertinggi terhadap OBJ06 (3,0), diikuti BappedaProv (2,9), DisparProv (2,7), BappedaKab (3,5), DisparKab (3,2), dan BP (3,0). Sebaliknya, Perhutani memiliki skor terendah (−4,6), diikuti BKSDA (−3,7), TN (−3,2), Investor (−2,7), serta PTPN (−3,5). Aktor lainnya menunjukkan posisi yang relatif rendah hingga positif, seperti BUMDes (−0,6), Pelaku (−0,6), FK3I (0,6), IGYF (0,7), Pokdarwis (0,6), Emvitrust (0,8), dan Media (0). Kondisi ini mengindikasikan bahwa nilai sosial-budaya belum diposisikan secara seragam sebagai bagian dari strategi pengembangan geowisata. Perbedaan tersebut dapat muncul karena setiap *stakeholder* memandang warisan budaya dari perspektif dan kepentingan yang berbeda. Aktor tertentu dapat menempatkan budaya sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan kawasan, sedangkan aktor pembangunan dan pariwisata dapat lebih menekankan fungsi budaya sebagai bagian dari daya tarik wisata dan pengembangan ekonomi. Ketidaksepakatan yang muncul tidak serta-merta menunjukkan penolakan terhadap budaya lokal, tetapi dapat mencerminkan perbedaan persepsi mengenai fungsi dan cara mengintegrasikan budaya dalam pengembangan geopark. Hal ini sejalan dengan Tichaawa dan Lekgau (2025) yang menjelaskan bahwa integrasi antara *geodiversity*, *biodiversity*, dan *cultural diversity* masih menjadi tantangan utama dalam tata kelola geopark karena melibatkan berbagai kepentingan dan perspektif sektoral.

Sementara itu, Tata Kelola Kolaboratif dan Pendekatan *Bottom-Up* (OBJ02), Regulasi Pengembangan Geowisata Berbasis Masyarakat (OBJ03), Pelestarian *Geodiversity*, *Biodiversity*, dan *Cultural Diversity* (OBJ04), serta Promosi dan Branding Identitas Kawasan (OBJ07) menunjukkan tingkat mobilisasi masing-masing sebesar (32,2); (28,1); (33,2); dan (41,2). OBJ02 memiliki *number of agreements* sebesar 27,9 dan *number of disagreements* sebesar (−4,2). Pada tujuan ini, BappedaProv menunjukkan skor tertinggi (5,7), diikuti DisparProv (5,5), BappedaKab (4,6), DisparKab (4,3), dan BP (4,0), sedangkan BKSDA dan Investor menunjukkan skor terendah (masing-masing −1,8). OBJ03 memperoleh *number of agreements* sebesar 28,1, tanpa *disagreement* (0), dengan BappedaProv memperoleh skor tertinggi (5,7), diikuti BappedaKab dan DisparKab (masing-masing 4,6 dan 4,3), sedangkan sejumlah aktor seperti BKSDA, TN, PTPN, Perhutani, BUMDes, Pelaku, Investor, dan Media berada pada posisi (0). Pola tersebut menunjukkan bahwa regulasi berbasis masyarakat memiliki tingkat kesepakatan yang relatif kuat, tetapi intensitas posisi positif terutama terkonsentrasi pada aktor perencanaan dan pariwisata.

Pada OBJ04, *number of agreements* mencapai

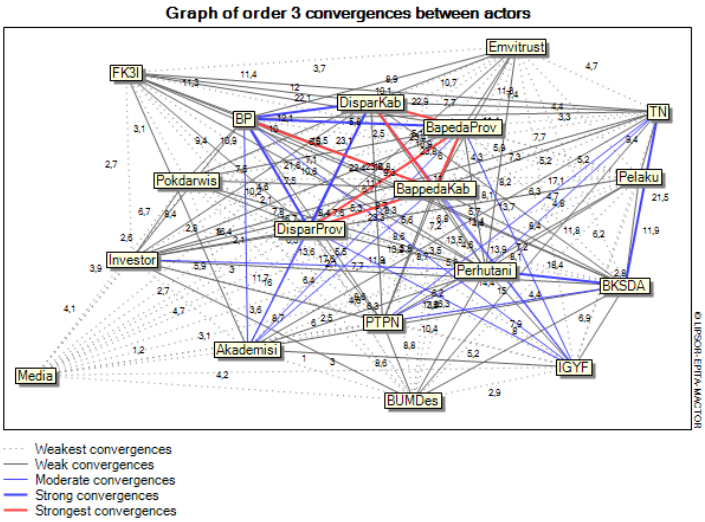
(28,4), *number of disagreements* sebesar (−4,8), dan tingkat mobilisasi sebesar (33,2). BKSDA menunjukkan skor tertinggi (7,4), diikuti TN (6,4), Perhutani (4,6), dan BP (2,0), sedangkan BUMDes dan Pokdarwis menunjukkan skor terendah, masing-masing (−1,8). Pola tersebut menunjukkan kuatnya orientasi aktor konservasi terhadap tujuan pelestarian, tetapi juga menunjukkan bahwa tujuan konservasi belum memperoleh posisi yang sama pada aktor ekonomi dan masyarakat lokal. Sementara itu, OBJ07 memiliki tingkat mobilisasi relatif tinggi, yaitu (41,2), dengan *number of agreements* sebesar (30,8) dan *number of disagreements* sebesar (−10,4). BappedaKab memiliki skor tertinggi (4,6), diikuti DisparKab (4,3), DisparProv (4,1), dan BP (4,0), sedangkan BKSDA menunjukkan skor terendah (−5,5), diikuti TN (−3,2) dan FK3I (−1,7). Promosi dan branding memperoleh dukungan relatif kuat dari aktor pembangunan dan pariwisata, tetapi tidak sepenuhnya selaras dengan posisi aktor konservasi. Hal ini sejalan dengan penelitian terhadap 1.658 unggahan media sosial tentang Ijen UNESCO Global Geopark menunjukkan dominasi narasi wisata/ekonomi (81,9%), sedangkan narasi konservasi (1,5%) dan edukasi (3,6%) jauh lebih rendah sehingga memperlihatkan adanya *visibility paradox*, yaitu pesan konservasi dan edukasi yang penting bagi keberlanjutan justru kurang mendapat perhatian dibandingkan promosi wisata (Sarwoprasodjo dkk., 2026b). Pola ini menunjukkan bahwa kesamaan orientasi terhadap pengembangan geopark tidak selalu menghasilkan keseragaman posisi terhadap setiap tujuan strategis. Perbedaan tersebut berkaitan dengan mandat, kepentingan, kewenangan, dan fungsi masing-masing *stakeholder* dalam sistem *multi-level governance*, di mana aktor pada berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor dapat memiliki arah tujuan yang relatif sama tetapi menggunakan pendekatan, instrumen, dan prioritas yang berbeda (Zhuang dkk., 2024; Sarwoprasodjo dkk., 2025).

Hasil 3MAO menunjukkan bahwa mobilisasi *stakeholder* di UNESCO Global Geopark Ijen dibentuk oleh tiga mekanisme utama, yaitu (1) kesamaan kepentingan ekonomi yang menghasilkan konsensus paling kuat, (2) perbedaan tingkat prioritas terhadap tujuan strategis, dan (3) variasi mandat kelembagaan yang menghasilkan posisi berbeda terhadap tujuan yang sama. Pola tersebut terlihat jelas dari OBJ05 yang memperoleh mobilisasi tertinggi (59,3) tanpa *disagreement*, sementara OBJ01 memperoleh mobilisasi terendah (27,5) dengan *disagreement* absolut tertinggi (21,5). Perbedaan posisi juga menunjukkan bahwa satu *stakeholder* dapat sangat mendukung satu tujuan tetapi memiliki posisi rendah terhadap tujuan lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh BKSDA pada OBJ04 (7,4), tetapi memiliki posisi rendah pada OBJ01 (−3,7) dan OBJ07 (−5,5). Oleh karena itu, asimetri relasi *stakeholder* tidak hanya tercermin dalam distribusi pengaruh dan ketergantungan, tetapi juga dalam ketidakseragaman mobilisasi terhadap tujuan strategis. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi tata kelola tidak cukup hanya meningkatkan partisipasi *stakeholder*, tetapi perlu menyesuaikan mekanisme koordinasi dengan posisi, kepentingan, dan kapasitas masing-masing aktor. Penguatan tata kelola adaptif-kolaboratif memerlukan mekanisme penyelarasan tujuan yang dapat menjadikan kepentingan ekonomi sebagai *common ground*, sekaligus menghubungkannya dengan fungsi konservasi, geoedukasi, dan pelestarian sosial-budaya sebagai bagian yang saling memperkuat dalam pengembangan UNESCO Global Geopark Ijen.

Grafik Konvergensi 3CAA

Analisis 3CAA (*Third Matrix of Convergences between Actors*) digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesamaan orientasi antar*stakeholder* terhadap tujuan strategis pengembangan geowisata berkelanjutan di UNESCO Global Geopark Ijen. Berbeda dengan analisis 3MAO yang menggambarkan tingkat mobilisasi setiap aktor terhadap tujuan strategis, analisis 3CAA menunjukkan potensi terbentuknya koalisi berdasarkan kesamaan orientasi dan kepentingan. Semakin tinggi tingkat konvergensi, semakin besar peluang aktor untuk membangun koordinasi, berbagi sumber daya, dan menyusun kebijakan secara bersama (Fauzi, 2019). Analisis ini tidak hanya menggambarkan kesamaan tujuan, tetapi juga menjelaskan bagaimana hubungan antaraktor membentuk konfigurasi tata kelola.

pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI: https://doi.org/10.32522/g8m7da76



Gambar 4. Grafik konvergensi *stakeholders*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa konvergensi terkuat terbentuk antara Bappeda Provinsi–Dinas Pariwisata Provinsi dan Bappeda Kabupaten (23,8), Bappeda Provinsi–Dinas Pariwisata Kabupaten (22,9), Bappeda Provinsi–Badan Pengelola (22,0), Dinas Pariwisata Provinsi–Bappeda Kabupaten (23,3), Dinas Pariwisata Provinsi–Dinas Pariwisata Kabupaten (22,4), Dinas Pariwisata Provinsi–Badan Pengelola (21,6), Bappeda Kabupaten–Dinas Pariwisata Kabupaten (23,4), Bappeda Kabupaten–Badan Pengelola (23,1), serta Dinas Pariwisata Kabupaten–Badan Pengelola (22,1). Pola tersebut menunjukkan bahwa koalisi utama dalam tata kelola Geopark Ijen terbentuk di antara institusi yang memiliki fungsi perencanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata.

Konvergensi yang tinggi tersebut tidak hanya disebabkan oleh kesamaan tujuan, tetapi juga oleh adanya keterkaitan kelembagaan yang bersifat struktural. Bappeda bertanggung jawab menyusun arah pembangunan daerah, Dinas Pariwisata mengimplementasikan kebijakan sektor pariwisata, sedangkan Badan Pengelola berfungsi mengoordinasikan berbagai program geopark. Ketiga institusi tersebut bekerja dalam siklus kebijakan yang saling bergantung, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Hubungan kerja yang berlangsung secara berkelanjutan menghasilkan kesamaan prioritas dan memperkuat pembentukan koalisi dalam pengelolaan geowisata. Tingginya konvergensi lebih mencerminkan interdependensi kelembagaan dibandingkan sekadar kesamaan persepsi terhadap tujuan pembangunan.

Hal ini juga menjelaskan mengapa aktor-aktor tersebut sebelumnya menempati posisi dominan pada peta *influence–dependence*. Aktor yang memiliki kewenangan tinggi cenderung membangun jaringan koordinasi yang lebih intensif karena mereka berbagi tanggung jawab terhadap pencapaian target pembangunan daerah dan pengelolaan geopark. Semakin besar ketergantungan terhadap proses perencanaan bersama, semakin kuat pula konvergensi yang terbentuk. Distribusi pengaruh yang tinggi mendorong terbentuknya koalisi inti (*core coalition*) yang menjadi pusat pengambilan keputusan dalam tata kelola Geopark Ijen. Temuan ini sejalan dengan Zhuang dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa pada sistem *multi-level governance*, institusi pemerintah membangun jejaring koordinasi yang kuat karena memiliki kewenangan formal, mekanisme perencanaan yang terintegrasi, serta tanggung jawab bersama terhadap implementasi kebijakan. Sarwoprasodjo dkk. (2025) juga menegaskan bahwa efektivitas tata kelola kawasan konservasi sangat ditentukan oleh kapasitas aktor pemerintah dalam membangun koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.

Sebaliknya, konvergensi terendah terjadi antara FK3I dan media (0), diikuti oleh IGYF dan media (1,0), serta akademisi dan media (1,2). Rendahnya konvergensi tersebut menunjukkan bahwa aktor-aktor ini belum membentuk hubungan strategis yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Penyebab utamanya bukan karena adanya konflik kepentingan, melainkan karena setiap aktor menjalankan fungsi yang berbeda dan belum terhubung dalam mekanisme koordinasi yang sama. Media berfokus pada diseminasi informasi dan promosi kawasan, akademisi berperan dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan, sedangkan FK3I dan IGYF lebih berorientasi pada kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan fungsi tersebut menyebabkan interaksi antaraktor lebih bersifat

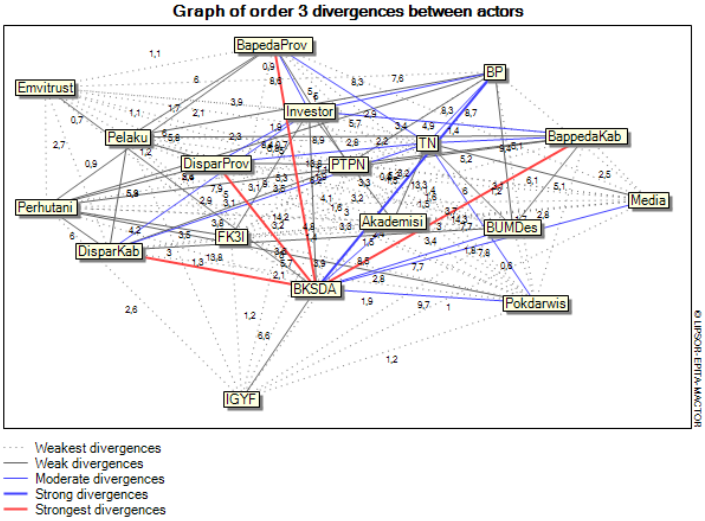
insidental dibandingkan kolaboratif sehingga orientasi strategis yang terbentuk menjadi relatif lemah.

Rendahnya konvergensi ini mengindikasikan bahwa tata kelola Geopark Ijen masih didominasi oleh jejaring birokrasi, sementara jejaring pengetahuan (*knowledge network*) dan jejaring komunikasi publik (*communication network*) belum berkembang secara optimal. Padahal, dalam konsep UNESCO Global Geopark, keberhasilan pengelolaan kawasan tidak hanya ditentukan oleh koordinasi antarinstansi pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan menghubungkan pemerintah dengan akademisi, komunitas, media, dan masyarakat melalui proses pembelajaran sosial (*social learning*) dan pertukaran pengetahuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Carrillo-Hernández dkk. (2024) yang menekankan bahwa kolaborasi lintas aktor menjadi prasyarat bagi pengembangan geowisata yang mampu mengintegrasikan konservasi, pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Demikian pula, Mammadova dkk. (2025) menunjukkan bahwa lemahnya keterhubungan antara institusi pendidikan, komunitas, dan pemerintah menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas tata kelola geopark.

Konvergensi *stakeholder* di UNESCO Global Geopark Ijen dibentuk oleh tiga mekanisme utama, yaitu (1) keterkaitan fungsi kelembagaan dalam siklus kebijakan, (2) ketergantungan terhadap proses koordinasi dan perencanaan lintas sektor, serta (3) intensitas interaksi antaraktor dalam jaringan tata kelola. Ketiga mekanisme tersebut menjelaskan bahwa pembentukan koalisi tidak terjadi secara otomatis karena kesamaan tujuan, tetapi berkembang melalui hubungan kelembagaan yang berlangsung secara berulang dan saling bergantung. Konfigurasi ini sekaligus menunjukkan bahwa asimetri relasi *stakeholder* tidak hanya menghasilkan konsentrasi pengaruh pada aktor tertentu, tetapi juga membentuk konsentrasi koalisi pada jejaring pemerintah. Tata kelola adaptif-kolaboratif perlu diarahkan untuk memperluas koalisi dengan mengintegrasikan akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berbasis pengetahuan.

Grafik Divergensi 3DAA

Analisis 3DAA (*Third Matrix of Divergences between Actors*) digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perbedaan orientasi antar*stakeholder* terhadap tujuan strategis pengembangan geowisata berkelanjutan di UNESCO Global Geopark Ijen. Berbeda dengan analisis 3CAA yang menunjukkan potensi pembentukan koalisi berdasarkan kesamaan tujuan, analisis 3DAA mengidentifikasi pasangan aktor yang memiliki perbedaan kepentingan paling besar sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses koordinasi maupun implementasi kebijakan. Menurut Fauzi (2019), semakin tinggi nilai divergensi maka semakin besar peluang terjadinya perbedaan prioritas, strategi, maupun preferensi antaraktor dalam sistem tata kelola.



Gambar 5. Grafik divergensi *stakeholders*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa divergensi tertinggi terbentuk antara BKSDA dengan Bappeda Provinsi (13,8), Dinas Pariwisata Provinsi (14,2), Bappeda Kabupaten (14,3), Dinas Pariwisata Kabupaten (13,8), dan Badan Pengelola (13,3). Pola ini menunjukkan bahwa perbedaan utama dalam tata kelola Geopark Ijen tidak terjadi antara pemerintah dan masyarakat, melainkan antara aktor yang memiliki mandat konservasi dengan aktor yang berorientasi pada perencanaan

pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI: https://doi.org/10.32522/g8m7da76

pembangunan dan pengembangan pariwisata.

Tingginya divergensi tersebut terbentuk karena setiap kelompok aktor menjalankan mandat kelembagaan yang berbeda. Sebagai pengelola kawasan konservasi, BKSDA memiliki tanggung jawab utama menjaga *biodiversity* melalui pengendalian pemanfaatan kawasan, pembatasan aktivitas wisata, serta penerapan regulasi konservasi. Sebaliknya, Bappeda, Dinas Pariwisata, dan Badan Pengelola lebih berorientasi pada peningkatan aksesibilitas, pengembangan destinasi, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pencapaian target pembangunan daerah. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan setiap aktor menggunakan indikator keberhasilan yang berbeda dalam mengevaluasi pengembangan geowisata. Divergensi muncul bukan karena adanya pertentangan tujuan akhir, tetapi karena perbedaan prioritas dan kewenangan atau mandat.

Mekanisme ini menjelaskan mengapa BKSDA sebelumnya berada pada posisi aktor kunci dalam peta *influence–dependence*, tetapi sekaligus memiliki tingkat divergensi yang tinggi terhadap aktor pembangunan. Semakin besar kewenangan suatu institusi dalam menjalankan mandat spesifiknya, semakin kuat pula kecenderungan institusi tersebut mempertahankan orientasi kebijakan sesuai fungsi organisasinya. Akibatnya, ketika proses pengembangan geowisata menuntut integrasi antara konservasi dan pembangunan, perbedaan orientasi menjadi semakin nyata. Oleh karena itu, divergensi pada Geopark Ijen lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari spesialisasi kelembagaan daripada sebagai bentuk konflik antarorganisasi.

Temuan ini memberikan perspektif yang berbeda dari pandangan bahwa konservasi dan pembangunan selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aktor pada dasarnya memiliki tujuan bersama untuk mendukung pengembangan geowisata berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya mobilisasi terhadap beberapa tujuan strategis pada analisis 3MAO. Namun, kesamaan tujuan tersebut diterjemahkan melalui pendekatan yang berbeda sesuai mandat masing-masing lembaga. Divergensi yang tinggi lebih mencerminkan perbedaan strategi implementasi daripada perbedaan visi pembangunan. Fenomena ini sejalan dengan Meza-Arce dkk. (2020) yang menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi umumnya menghadapi ketegangan antara perlindungan sumber daya alam dan pemanfaatan ekonomi. Zhuang dkk. (2024) juga menegaskan bahwa dalam sistem *multi-level governance*, perbedaan mandat antarorganisasi merupakan konsekuensi alami dari pembagian kewenangan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.

Sebaliknya, divergensi terendah (0) ditemukan antara BUMDes dengan masyarakat, serta antara institusi perencanaan dan pariwisata dengan akademisi. Rendahnya divergensi tersebut menunjukkan bahwa aktor-aktor tersebut memiliki orientasi strategis yang relatif selaras sehingga tidak terdapat perbedaan mendasar dalam memandang tujuan pengembangan geowisata. Pada hubungan BUMDes dan masyarakat, kesamaan tersebut dibentuk oleh kepentingan yang sama terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis geowisata. Sementara itu, keselarasan antara institusi perencanaan, sektor pariwisata, dan akademisi menunjukkan bahwa fungsi penelitian, perencanaan, dan pengembangan kawasan saling melengkapi dalam mendukung penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan. Rendahnya divergensi menunjukkan adanya potensi kemitraan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat inovasi, penyusunan kebijakan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Divergensi *stakeholder* di UNESCO Global Geopark Ijen dibentuk oleh tiga mekanisme utama, yaitu (1) perbedaan mandat kelembagaan antara aktor konservasi dan aktor pembangunan, (2) perbedaan indikator keberhasilan yang digunakan dalam mengevaluasi pengelolaan kawasan, serta (3) variasi strategi implementasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketiga mekanisme tersebut menunjukkan bahwa asimetri relasi *stakeholder* tidak selalu menghasilkan konflik, tetapi menciptakan ruang negosiasi yang harus dikelola melalui koordinasi lintas sektor, dialog berbasis kajian ilmiah, dan mekanisme pengambilan keputusan yang adaptif. Oleh karena itu, tata kelola adaptif-kolaboratif menjadi penting untuk menjembatani perbedaan orientasi antaraktor tanpa menghilangkan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga.

Implikasi Tata Kelola Adaptif-Kolaboratif

Berdasarkan integrasi hasil analisis *influence–dependence*, 3MAO, 3CAA, dan 3DAA, terdapat *stakeholder* yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan Geopark Ijen tetapi belum memiliki posisi yang sebanding dengan kepentingan dan kontribusi potensialnya dalam proses pengambilan keputusan. Kelompok tersebut terutama mencakup BUMDes, Pokdarwis, IGYF, dan pelaku wisata, yang memiliki pengaruh relatif rendah dibandingkan aktor pemerintah dan pengelola kawasan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara posisi aktor lokal sebagai

pelaksana kegiatan geowisata dengan kapasitasnya dalam memengaruhi perumusan agenda dan kebijakan. Padahal, aktor-aktor tersebut memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, aktivitas wisata, dan kondisi sosial-ekonomi di tingkat tapak. Rendahnya pengaruh tidak dapat dipahami sebagai rendahnya kepentingan, tetapi menunjukkan bahwa pengetahuan dan pengalaman aktor lokal belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Implikasinya, penguatan tata kelola perlu memperluas keterlibatan aktor lokal dari sekadar pelaksana menjadi *co-decision maker* dalam perumusan prioritas, pengembangan program, dan evaluasi pengelolaan geowisata.

Hasil 3MAO memperkuat kebutuhan tersebut. BUMDes, Pokdarwis, dan pelaku wisata menunjukkan posisi yang relatif rendah terhadap beberapa tujuan strategis, terutama Edukasi dan Literasi Geowisata (OBJ01) serta Pelestarian *Geodiversity*, *Biodiversity*, dan *Cultural Diversity* (OBJ04). Sebaliknya, Pertumbuhan dan Stimulus Ekonomi Berkelanjutan (OBJ05) memperoleh mobilisasi tertinggi sebesar 59,3 tanpa *disagreement*. Pola ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi merupakan titik temu yang paling kuat di antara *stakeholder*, tetapi belum otomatis menghasilkan mobilisasi yang sama terhadap tujuan konservasi dan edukasi. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan aktor lokal perlu menggunakan kepentingan ekonomi sebagai pintu masuk untuk mengintegrasikan tujuan konservasi dan edukasi. BUMDes dan Pokdarwis, misalnya, dapat dilibatkan dalam pengembangan produk geoedukasi, interpretasi *geosite*, pengelolaan wisata berbasis konservasi, dan pemantauan kondisi lingkungan, sehingga manfaat ekonomi yang mereka peroleh berjalan seiring dengan fungsi perlindungan kawasan.

Di sisi lain, hasil 3CAA menunjukkan terbentuknya koalisi inti antara BappedaProv, DisparProv, BappedaKab, DisparKab, dan Badan Pengelola. Konvergensi tinggi di antara aktor tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kuat dalam proses perencanaan, pengembangan pariwisata, dan koordinasi pengelolaan geopark. Namun, dalam konteks Geopark Ijen, hubungan tersebut juga perlu dilihat bersama dengan divergensi tinggi antara kelompok aktor tersebut dan BKSDA. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tata kelola tidak hanya berupa kurangnya koordinasi, tetapi juga menyangkut *overlap* kepentingan dan kewenangan pada ruang pengelolaan yang sama.

Irisan tersebut terutama terlihat pada TWA Kawah Ijen, yang berada dalam kawasan konservasi sekaligus memiliki fungsi sebagai bagian dari *geosite* Geopark Ijen. Kondisi tersebut menempatkan BKSDA sebagai aktor yang memiliki mandat perlindungan kawasan konservasi, sementara BappedaProv, DisparProv, BappedaKab, DisparKab, dan Badan Pengelola memiliki kepentingan dan fungsi dalam perencanaan pembangunan, pengembangan pariwisata, serta pengelolaan geopark. Satu ruang geografis dapat menjadi objek dari beberapa kepentingan kelembagaan sekaligus. Ketika agenda pengembangan geowisata mendorong peningkatan aksesibilitas, kunjungan, fasilitas, dan aktivitas ekonomi, sementara mandat konservasi menuntut pembatasan pemanfaatan dan perlindungan integritas kawasan, *overlap* ruang pengelolaan tersebut dapat menghasilkan konflik antara kepentingan konservasi dan pemanfaatan wisata. Temuan ini konsisten dengan hasil 3DAA yang menunjukkan bahwa divergensi tertinggi terjadi antara BKSDA dengan BappedaProv (13,8), DisparProv (14,2), BappedaKab (14,3), DisparKab (13,8), dan Badan Pengelola (13,3).

Divergensi antara BKSDA dan aktor pembangunan tidak sebaiknya hanya ditafsirkan sebagai konsekuensi perbedaan mandat kelembagaan, tetapi sebagai bentuk *institutional overlap* yang dapat berkembang menjadi konflik tata kelola ketika mandat konservasi dan pemanfaatan wisata diterapkan pada ruang yang sama. Perbedaan mandat memang merupakan sumber struktural divergensi, tetapi keberadaan TWA Kawah Ijen sebagai kawasan konservasi yang sekaligus menjadi bagian dari pengembangan Geopark Ijen membuat perbedaan tersebut memiliki konsekuensi praktis terhadap keputusan pengelolaan. Dalam situasi tersebut, BKSDA memiliki kepentingan untuk mempertahankan batas dan fungsi konservasi, sedangkan aktor perencanaan dan pariwisata memiliki kepentingan untuk memastikan kawasan dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi. Dengan kata lain, konflik bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan tujuan akhir, tetapi dapat muncul ketika kewenangan, ruang pengelolaan, dan instrumen kebijakan beririsan. Hal ini sejalan dengan Meza-Arce dkk. (2020) yang menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi dapat menghadapi ketegangan antara perlindungan sumber daya alam dan pemanfaatan ekonomi. Zhuang dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa pembagian kewenangan lintas sektor dalam *multi-level governance* dapat menghasilkan perbedaan kepentingan dan kebutuhan koordinasi antarlembaga.

Implikasi penting dari kondisi tersebut adalah

pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI: https://doi.org/10.32522/g8m7da76

bahwa koordinasi saja tidak cukup. Diperlukan mekanisme tata kelola yang secara eksplisit mengatur hubungan antara fungsi konservasi dan fungsi pengembangan geowisata pada kawasan yang memiliki status dan kepentingan pengelolaan ganda. Badan Pengelola tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai koordinator program, tetapi juga sebagai *bridging institution* yang mempertemukan mandat konservasi BKSDA dengan agenda pembangunan Bappeda dan pengembangan pariwisata pada tingkat provinsi maupun kabupaten. Mekanisme tersebut dapat diwujudkan melalui forum lintas kelembagaan yang memiliki mandat jelas untuk menyepakati zonasi pemanfaatan, batas aktivitas wisata, kapasitas kunjungan, pengembangan infrastruktur, indikator konservasi, serta mekanisme evaluasi bersama. Keputusan mengenai pengembangan geowisata pada kawasan yang beririsan tidak ditentukan secara sektoral, tetapi melalui proses *decision-making*.

Selain persoalan BKSDA dan aktor pembangunan, terdapat stakeholder yang berpotensi berperan sebagai *bridging actors* tetapi belum terintegrasi secara optimal, terutama akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pemuda. Hasil 3CAA menunjukkan konvergensi yang rendah antara FK3I dan media (0,0), IGYF dan media (1,0), serta akademisi dan media (1,2). Rendahnya konvergensi tersebut tidak menunjukkan adanya konflik langsung, tetapi mengindikasikan bahwa fungsi pengetahuan, komunikasi publik, advokasi, dan pemberdayaan belum terhubung secara strategis. Aktor-aktor tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat *evidence-based decision making*, komunikasi risiko konservasi, edukasi publik, dan *social learning* dalam proses penyelesaian perbedaan antara kepentingan konservasi dan pengembangan wisata.

Terdapat dua bentuk persoalan tata kelola utama. Pertama, terdapat ketimpangan posisi stakeholder, terutama ketika aktor lokal yang memiliki kepentingan dan pengetahuan langsung mengenai pengelolaan di tingkat tapak belum memiliki pengaruh yang sebanding dalam pengambilan keputusan. Kedua, terdapat *overlap* kelembagaan dan ruang pengelolaan, terutama pada hubungan BKSDA dengan BappedaProv, DisparProv, BappedaKab, DisparKab, dan Badan Pengelola dalam pengelolaan kawasan yang memiliki fungsi konservasi sekaligus fungsi geowisata. Oleh karena itu, persoalan tata kelola Geopark Ijen bukan sekadar kekurangan koordinasi, tetapi merupakan persoalan distribusi pengaruh, irisan kewenangan, perbedaan kepentingan, dan belum optimalnya mekanisme integrasi antaraktor.

Berdasarkan temuan tersebut, tata kelola adaptif-kolaboratif di Geopark Ijen perlu dibangun melalui empat mekanisme utama, yaitu (1) redistribusi ruang pengambilan keputusan dengan memperkuat posisi aktor lokal; (2) penyelarasan tujuan strategis (*goal alignment*) dengan menggunakan manfaat ekonomi sebagai *common ground* untuk mengintegrasikan konservasi dan geoedukasi; (3) pembentukan mekanisme koordinasi lintas kewenangan untuk mengelola overlap antara konservasi dan pengembangan wisata, khususnya pada kawasan seperti TWA Kawah Ijen; dan (4) penguatan *bridging actors* melalui keterlibatan akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas dalam penyediaan pengetahuan, komunikasi, dan *collaborative learning*. Pendekatan ini tidak bertujuan menghilangkan divergensi, karena sebagian perbedaan diperlukan untuk menjaga fungsi *checks and balances* antara konservasi dan pembangunan, tetapi mengubah divergensi dari sumber konflik menjadi mekanisme negosiasi dan pembelajaran kelembagaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan Meza-Arce dkk. (2020) dan Zhuang dkk. (2024) yang menekankan pentingnya dialog lintas sektor, pembelajaran bersama, dan pengambilan keputusan dalam menghadapi perbedaan kepentingan dalam tata kelola kawasan. Keempat mekanisme tersebut memungkinkan perbedaan posisi *stakeholder* dikelola sesuai fungsinya: aktor kunci menggunakan pengaruhnya untuk memfasilitasi kolaborasi dan membuka ruang keputusan bersama; aktor *relay* memperkuat konektivitas dan koordinasi antaraktor; aktor *dependent* (*driven*) diperkuat kapasitas dan ruang pengaruhnya agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam pengambilan keputusan; sedangkan aktor *autonomous* diberi ruang untuk menyediakan pengetahuan, informasi, dan dukungan yang relevan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pengembangan geowisata di UNESCO Global Geopark Ijen dicirikan oleh asimetri relasi stakeholder. Analisis pengaruh–ketergantungan menunjukkan empat posisi *stakeholder*, yaitu aktor kunci, *relay*, *dependent (driven)*, dan *autonomous* yang menunjukkan distribusi kapasitas pengaruh dan ketergantungan yang tidak seimbang dalam tata kelola karena terdapat *stakeholder* yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan Geopark Ijen tetapi belum memiliki pengaruh yang

sebanding dengan kepentingan strategisnya dalam tata kelola. Orientasi ekonomi menjadi *common ground* yang paling kuat, sementara tujuan edukasi dan literasi geowisata masih memperoleh dukungan yang relatif rendah. Konvergensi terkonsentrasi pada aktor perencanaan, pariwisata, dan Badan Pengelola, sedangkan divergensi kuat ditemukan antara BKSDA dan aktor perencanaan serta pariwisata. Pola tersebut menunjukkan bahwa perbedaan orientasi dan posisi dapat membentuk irisan kepentingan dan kewenangan dalam pengelolaan ruang Geopark Ijen. Temuan tersebut berimplikasi bahwa pengelolaan perlu diarahkan pada tata kelola adaptif-kolaboratif melalui empat mekanisme: redistribusi ruang pengambilan keputusan, penyelarasan tujuan strategis, penguatan jejaring kolaborasi dan *bridging actors*, serta pengelolaan divergensi dan *overlap* kelembagaan. Tata kelola adaptif-kolaboratif dapat menjadi pendekatan untuk mentransformasikan asimetri relasi *stakeholder* menjadi sinergi kelembagaan, sehingga konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi dapat berjalan secara seimbang dalam mendukung keberlanjutan tata kelola geopark.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh informan atas kesediaannya memberikan informasi. Penelitian ini merupakan bagian dari pendanaan Penelitian Fundamental Reguler BIMA Tahun 2024 dan 2025, khususnya untuk mendukung proses pengumpulan data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Halim, M. H., Talib, N. K., Masnan, S. S. K., Rashidi, N. A., & Saidin, M. (2025). Geoheritage tourism in Lenggong Valley, Perak, Malaysia: Local community involvement. GeoJournal of Tourism and Geosites, 59(2), 844–855. https://doi.org/10.30892/gtg.59229-1461

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Carrillo-Hernández, Y. M., Ríos-Reyes, C. A., & Villarreal-Jaimes, C. A. (2024). Geotourism and Geoeducation: A Holistic Approach for Socioeconomic Development in Rural Areas of Los Santos Municipality, Santander, Colombia. Geoheritage, 16(4), 94. https://doi.org/10.1007/s12371-024-00974-6

Dwipati, U., Ibrahim, M. A., & Abdullah, M. T. (2025). Assessing and initiating collaborative governance for sustainable geotourism development: A case study of Maros-Pangkep Geopark in Indonesia. Edelweiss Applied Science and Technology, 9(5), 1406–1412. https://doi.org/10.55214/25768484.v9i5.7173

Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books.

Fauzi, A. (2019). Teknik Analisis Keberlanjutan. Gramedia.

Hadian, M. S. D., Barkah, M. N., Khadidjah, U. L. S., Yuliawati, A. K., Aryanti, A. N., & Suhardiman, S. (2025). Urban geotourism development in the perspective of stakeholders. International Journal of Geoheritage and Parks, 13(1), 102–116. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2024.12.001

Ibrahim, M. S. N., Abdul-Halim, S., Ishak, M. Y., & Hassan, S. (2021). The local community awareness on Langkawi UNESCO Global Geopark status: Case of Kampung Padang Puteh, Langkawi, Malaysia. International Journal of Geoheritage and Parks, 9(2), 233–241. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2021.02.009

Ilhami, W. T., Arifin, H. S., Pramudya, B., & Kosmaryandi, N. (2024). Sustainable scientific tourism development planning using Micmac-Mactor in Bogor City. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 14(4), 757. https://doi.org/10.29244/jpsl.14.4.757

Kurnianingsih, T., Lestari, E., Rusdiyana, E., Widiyanto, Sugihardjo, & Setyowati, R. (2025). Relations between actors in agrotourism development. BIO Web of Conferences, 158, 02006. https://doi.org/10.1051/bioconf/202515802006

Lee, K. C., & Karimova, P. G. (2021). From cultural landscape to aspiring geopark: 15 years of community-based landscape tourism in Fengnan Village, Hualien County, Taiwan, 2006–2021. Geosciences, 11(8), 310. https://doi.org/10.3390/geosciences11080310

Mafruhah, I., Supriyono, Mulyani, N. S., & Istiqomah, N. (2020). Causality between

pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI: https://doi.org/10.32522/g8m7da76

tourism industry development and the ecological sustainability in marine environment: A convergence and divergence among stakeholder with MACTOR analysis. International Journal of Energy Economics and Policy, 10(4), 85–92. https://doi.org/10.32479/ijeep.7989

Mammadova, A., May, S. M., Tomita, Y., & Harada, S. (2025). Synergies and conflicts in dual-designated UNESCO sites: Managing governance, conservation, tourism, and community engagement at Mount Hakusan Global Geopark and Biosphere Reserve, Japan. Land, 14(3), 488. https://doi.org/10.3390/land14030488

Meza-Arce, M. I., Malpica-Cruz, L., Hoyos-Padilla, M. E., Mojica, F. J., Arredondo-García, M. C., Leyva, C., Zertuche-Chanes, R., & Santana-Morales, O. (2020). Unraveling the white shark observation tourism at Guadalupe Island, Mexico: Actors, needs and sustainability. Marine Policy, 119, 104056. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104056

Munajat, M., Avenzora, R., Darusman, D., & Basuni, S. (2022). Polarization of stakeholder orientation towards geotourism development in the Mount Slamet and Serayu Mountainous Areas, Central Java Province. Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 28(3), 201–211. https://doi.org/10.7226/jtfm.28.3.201

Sarwoprasodjo, S., Kinseng, R. A., Sunarminto, T., Mijiarto, J., Hidayati, R. K., Syifa', F. A., Dzar, A. A., Syah, M. R. A. A., Muthmainnah, H. S., & Santoso, Z. F. (2025). Fostering ecosystem resilience through targeted communication: A cluster analysis of Ijen Geopark Communities. BIO Web of Conferences, 175, 04003. https://doi.org/10.1051/bioconf/202517504003

Sarwoprasodjo, S., Sunkar, A., Putra, R. A., Khofsah, A., Syifa', F. A., Tandio, T., Saharuddin, & Sabila, F. S. N. (2026a). Waste to welfare: Village-level circular economy innovation for sustainable environmental governance. BIO Web of Conferences, 234, 04017. https://doi.org/10.1051/bioconf/202623404017

Sarwoprasodjo, S., Nurkasanah, A., Syifa', F. A., & Sari, Y. (2026b). The visibility paradox of conservation communication in UNESCO Geoparks: Evidence from social media analysis of Ijen Geopark. Studies in Media and Communication, 14(3), 134–144. https://doi.org/10.11114/smc.v14i3.8470

Tichaawa, T. M., & Lekgau, R. J. (2025). Exploring micro- and sectoral-level collaboration within a transfrontier conservation network in Southern Africa. GeoJournal of Tourism and Geosites, 63(4), 2851–2859. https://doi.org/10.30892/gtg.634spl29-1644

Yasa, I. N. M., Suasih, N. N. R., & Mahaendrayasa, M. S. A. (2024). Polemic on the agricultural land conversion for tourism sector in the Province of Bali: Factors and actors. Research on World Agricultural Economy, 5(4), 270–282. https://doi.org/10.36956/rwae.v5i4.1164

Yuliaty, C., Kurniasari, N., Triyanti, R., & Zulham, A. (2021). Stakeholders role in economy creative development of maritime culture in Alor Regency. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 744(1), 012107. https://doi.org/10.1088/1755-1315/744/1/012107

Zhang, P., Li, J., Wang, J., Li, R., & Zhao, T. (2025). Distribution of the land value increment in the context of rural tourism. Sustainability, 17(24), 11024. https://doi.org/10.3390/su172411024

Zhuang, A., Stoffelen, A., Meijles, E., & Groote, P. (2024). The complex governance of protected areas: Insights from geoheritage and geopark management in China. Environmental Policy and Governance, 34(6), 679–690. https://doi.org/10.1002/eet.2118